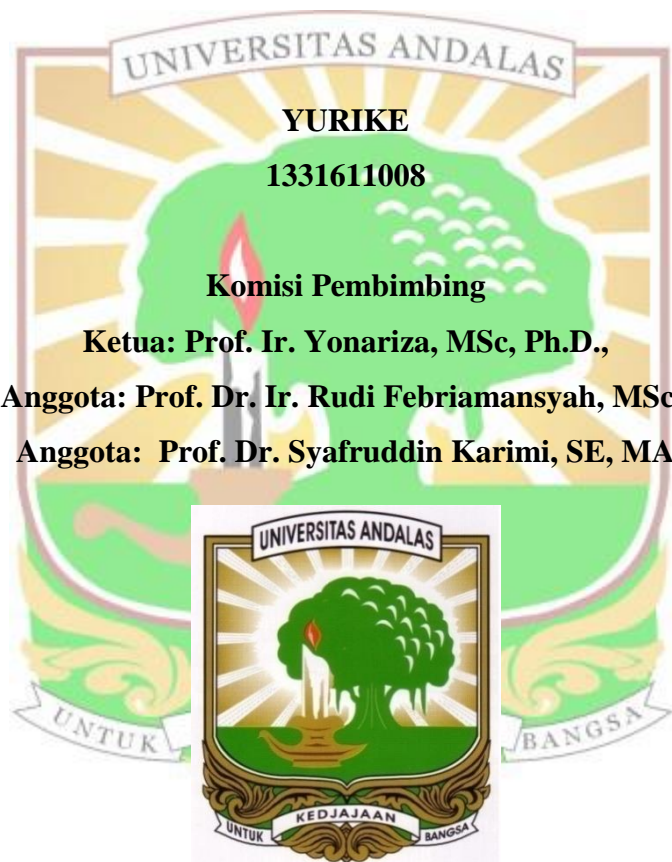


**POLA PERILAKU PERAMBAHAN HUTAN DI WILAYAH KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA**

Disertasi



YURIKE

1331611008

Komisi Pembimbing

Ketua: Prof. Ir. Yonariza, MSc, Ph.D.,

Anggota: Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, MSc.,

Anggota: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2018

**POLA PERILAKU PERAMBAHAN HUTAN DI WILAYAH KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA**

Oleh: YURIKE (1331811008)

(Di bawah bimbingan: Prof. Ir. Yonariza, MSc, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Rudi
Febriamansyah, MSc., Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA.)

Abstrak

Studi ini dimotivasi oleh tingginya laju deforestasi di Kabupaten Dharmasraya karena konversi hutan menjadi perkebunan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perubahan kondisi hutan di kawasan KPHP Dharmasraya, menganalisis karakteristik sosial ekonomi, persepsi, pola perilaku perambahan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode survei yang melibatkan 250 rumah tangga. Data dianalisis secara kualitatif (*causal loop diagram*) dan kuantitatif (analisis faktor dan *multinomial*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan hutan di KPHP Dharmasraya telah hilang sebesar 85% dalam dekade terakhir. Perambahan hutan di picu oleh kekosongan saat peralihan PT Ragusa ke Inhutani. Kepemilikan lahan di Dharmasraya merupakan lahan komunal suku Melayu. Perambah hutan di Dharmasraya diklasifikasikan sebagai keluarga menengah ke atas, hal ini terjadi karena adanya kesempatan untuk berinvestasi. Terdapat 3 pola perilaku perambahan hutan yaitu pola tidak ramah hutan, pola campuran dan pola ramah hutan. Pendidikan pendatang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk lokal, namun pola perambahan penduduk lokal lebih ramah hutan jika dibandingkan dengan pendatang. Jika dilihat berdasarkan luas lahan, maka luas lahan perkebunan karet paling sedikit, yakni 822 ha, sedangkan luas perkebunan sawit mencapai 1.203 ha. Sebesar 35,2% responden memilih pola campuran. Hal ini perlu menjadi perhatian karena ada kecenderungan responden yang awalnya hanya menanam karet kemudian juga membuka lahan untuk menanam sawit. Model sistem dinamis menunjukkan deforestasi dipicu oleh lemahnya penegakan hukum sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan perambahan. Hal ini mengarah pada jual beli lahan hutan di Dharmasraya. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan akan lahan. Faktor-faktor yang signifikan ($\text{sig} < 0,05$) mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan diantaranya: faktor pendapatan dan asset yang memadai, ketersediaan tenaga kerja keluarga, pengalaman bertani, persepsi perambah tentang fungsi. Penegakan hukum yang lemah memfasilitasi perambahan lahan hutan, hal yang sama juga berlaku untuk kurangnya perhatian dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: deforestasi, elite lokal, konversi lahan, lahan adat, perambahan hutan

**THE PATTERN OF FOREST ENCROACHMENT BEHAVIOR IN
PRODUCTION FOREST MANAGEMENT (KPHP) DHARMASRAYA,
WEST SUMATERA PROVINCE, INDONESIA**

BY YURIKE (1331811008)

Supervised by: Prof. Ir. Yonariza, MSc, Ph.D; Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah,
MSc. dan Prof.Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA.)

Abstract

This study was motivated by the high rate of deforestation in Dharmasraya District due to the conversion of forests to plantations. The objective of this study were to describe changes in forest conditions in the Dharmasraya KPHP area and to analyze socio-economic characteristics, perceptions, patterns of forest encroachment behavior and factors that influence the behavior patterns of forest encroachment in the Dharmasraya KPHP area. This study used a survey method involving 250 households. Data were analyzed qualitatively (causal loop diagrams) and quantitatively (factor analysis and multinomial). The results showed that the forest area in KPHP Dharmasraya had been lost by 85% in the last decade. Forest encroachment was triggered by a vacuum during the transfer of PT Ragusa to Inhutani. Land ownership in Dharmasraya is a communal area of Malay tribes. The forest encroachment in Dharmasraya is classified as an upper middle-class family. This happens because they are of the opportunity to invest. There are 3 patterns of behavior of forest encroachment which are forest-unfriendly patterns, mixed patterns and forest-friendly patterns. Migrant education is higher that of the local population, but the pattern of local population encroachment is more forest-friendly compared that of the migrants. When viewed on the basis of land area, the least rubber plantation area is 822 ha, while the area of oil palm plantations reaches 1,203 ha. As much as 35.2% of respondents chose a mixed pattern. This needs to be a concern because there is a tendency for respondents who initially only planted rubber to start clearing land to plant oil palm. The dynamic system model shows that deforestation is triggered by weak law enforcement so as to provide opportunities for people to encroach. This leads to the sale and purchase of forest land in Dharmasraya. Increasing income will make increasing demand for land. Significant (sig <0.05) factors affect the behavior patterns of forest encroachment: adequate income and asset factors, availability of family workforce, farming experience, encroachment perceptions of forestry functions. Weak law enforcement facilitates encroachment of forest land, the same thing applies to the lack of attention and socialization of the government to the community.

Keywords: *deforestation, local elite, land conversion, customary land, forest encroachment*